BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

A. Zaman Penjajahan (Sebelum Tahun 1906)

Pada zaman penjajahan Belanda Indonesia disebut "Hindia Belanda", yang memegang kekuasaan di Hindia Belanda ialah seorang Gubernur Jenderal. Mr. Herman Willem Deandels adalah yang menjadi Gubernur Jenderal yang menjabat tahun 1808 dan tahun 1811. Gubernur inilah yang memerintahkan untuk membuat jalan raya sepanjang pulau Jawa dari anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini melintasi Wilayah Kabupaten Bandung dan Kotamadya Bandung. Pusat Pemerintah Kota Bandung pada waktu itu terletak di kota Krapyak (Citereup) yaitu kurang lebih 9 km sebelah Selatan dari pusat kota Bandung. Letak kota itu oleh Gubernur Jenderal Deandels dipandang dari segi komunikasi, stategi, keamanan dan pertahanan tidak memenuhi kepentingannya. Maka diperintahkan kepada Bupati Bandung, ketika itu Wiranatakusumah III untuk memindahkan Ibukota Kabupaten dari kota Krapyak ke sebelah utaranya pada poros jalan raya dekat dengan sungai Cikapundung.

Pembangunan Ibukota Kabupaten Bandung dilaksanakan dibawah pimpinan Bupati Wiranatakusumah III tanggal 25 Mei 1810. Pertama-tama dibangun gedung menghadap ke Alun-alun yang selesai pada 18 Januari 1881. Secara resmi

dipindahkannya Ibukota Kabupaten Bandung pada 25 Mei 1881. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten ternyata makin lama makin ramai, sehingga tahun 1862 oleh pemerintah Kolonial Belanda dijadi kan tempat kedudukan Residen Priangan, yang sebelumnya berkedudukan di Kota Cianjur.

Pada waktu R.A. Martanegara diangkat menjadi Bupati (1893) kota Bndung mengalami perubahan yang penting. Rumah-rumah yang beratap alang-alang diganti dengan genting. Selain itu juga memperhatikan perekonomian rakyat. Kota Bandung semakin lama semakin maju dan ramai. Terutama setelah adanya penghubung kereta api. Dengan keputusan Gubernur Jenderal pada 29 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai daerah Otonom *"Gemeente"* yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1906. Saat itulah yang dijadikan Hari Jadi Kota Bandung.

B. Zaman Pemerintahan Belanda (1906-1942)

Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 21 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai *"Gemeemte".* Menurut pasal 7 SK tersebut *"Gemeente Bandung"* itu diadakan suatu Dewan Haminte *(Gemeenteraad)* yang terdiri dari 11 anggota, yaitu 8 orang Bangsa Eropa, 2 orang Bangsa Indonesia Asli dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Badan tersebut diketuai oleh kepala Pemerintahan setempat *(Hoofd van Plaatselijk Bestuur)* di Bandung, yang dalam jabatan it uterus berlaku dari tahun 1906 sampai 1 Juli 1917, pada waktu itu pertama kalinya disebut *"Burgemeester van Bandung"* (Walikota Bandung).

Adanya penyusunan kembali pemerintahan, maka dengan SK Gubernur Jenderal pada 27 Agustus 1926 No. 3x (Staadsblaad 1926 N0. 369) sebagai

pelaksanaan dari *wet vande staads inriching van Ned Indie* dinyatakan berlaku untuk "Gemeente Bandung". Maka sejak 1 Oktober 1926 ketentuan dalam Stanadgemeentte Ordonantie berlaku untuk Gemeente Bandung. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 dari Staadgemeente Ordinantie, alat kelengkapan atau lembaga pemerintahan *"Staadgemeente Bandung",* yaitu *Raad (Stadsgemeente), College van Burgemeente en Wethouders* dan *Burgemester.*

C. Zanan Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada waktu pendudukan Jepang yaitu pada 9 Maret 1942 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Standsgemeenterad dan College van Burgemeester en Wethouders tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pemerintah kota Bandung seluruhnya dijalankan oleh seorang Sityo (Walikota) yang diangkat oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Pemerintah umum berada dalam tangan Sityo dan dalam Kota, Bupati Bandung tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Wilayah kota dibagi dalam empat kewedanaan yang masing-masing dikepalai oleh Wedana. Keempat kewedanaan, yaitu Bandung utara, Bandung Timur, Bandung Selatan dan Bandung Barat. Kewedanaan itu selanjutnya dibagi dalam beberaapa Desa yang dikepalai oleh Kutyo yang semuanya berjumlah 18 orang. Lurah-lurah dan pegawai Desa dijadikan Pegawai Negeri.

D. Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI maka Pemerintahan Kota Bandung dipinpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh suatu Komite Nasional. Komite Nasional ditugaskan untuk mengurus keamanan dan menyusun usaha perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Keadaan itu terus berlangsung sampai bulan April 1946, pada waktu itu seluruh kota Bandung diduduki oleh Tentara Sekutu. Seama kota Bandung diduduki Tentara Sekutu dan selanjutnya sampai terbentuknya *"Voorloopige Federal Regering voor Indonesia"* dulu (*Stadsdsblaad*, 1948 No.62) alat-alat pemerintah *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente de jure* tidak pernah dihapuskan. Keadaan tidak berubah setelah terbentuknya pemerintah Pra Federal.

Dengan SK Residen Kepala Pemerintah Priangan di Bandung pada 28 Juni 1948 No. 146 berdasarkan Peraturan kekuasaan Militer yang ditetapkan oleh Recomba Jawa Barat pada 6 Januari 1946 No. Recwj. 17/jiz Jo. tertanggal 20 Pebruari 1948 No. Recwj.20/jiz mulai 1 Juli 1948 untuk daerah *Staadsgemeente* Bandung dibentuk badan yang diserahi tugas kewajiban *College van Burgemeester en Wethouders* menurut *Staadsgemeente Ordonantie*. Badan itu dinamakan *Tijdelijke College van degelijks Bestuur* terdiri dari 11 anggota, yaitu 5 orang Bangsa Indonesia, 2 orang Bangsa Tionghoa, seorang Bangsa Arab dan 3 orang Bangsa Belanda, kesemuanya diangkat dengan SK tersebut. Kepala ketuan Badan tersebut diserahi tugas kewajiban Walikota menurut *Staadsgemeente Ordonantie*.kewajiban dijalankan oleh Residen K.P.S. Priangan . Pada 1 Juli 1948 alat-alat Staadsgemeente

Bandug dibangun kembali, berlaku sampai 24 Pebruari 1949 pada waktu mana SK Residen K.P.S. Priangan tersebut di cabut kembali.

Berhubung dengan penggabungan wilayah Negara Pasundan ke Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Presiden RIS No. 113 tahun 1950, maka telah dikeluarkan Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1950 mengenai pembubaran semua Dewan Perwakilam Rakyat Daerah yaitu Kabupaten dan Kota. Untuk menghindari kevakuman kekuasaan, maka dengan surat keputusan Gebernur Jawa Barat tertanggal 2 Juli 1950 No. 2/Uh/GD-8/50, ditetapkan bahwa :

- Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Haminte Kota dilakukan oleh Residen yang bersangkutan, untuk Haminte Bandung oleh Residen Priangan.
- Kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, untuk Haminte bandung oleh WaliKota Bandung.

Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 4 April 1950 dan dengan demikian berakhirlah hidupnya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan badan Pengurus Harian tersebut. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Bandung, yang didasarkan kepada Peratiran Pemerintah RI No. 39 tahun 1950. Pemilihan tersebut dilakukan dibawah pimpinan panitia Penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang diketuai

oleh Walikota Sendiri. Pada tanggal 6 Nopember 1950 diangkat 5 orang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara bersama-sama dengan Walikota Kepala Daerah Kota Besar Bandung yang merupakan Dewan Pemerintahan Daerah sementara.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah di Indonesia, maka perundang-undang lainnya mengenai Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No 1957 bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam Daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, yaitu Daerah swantara I, Daerah swantara Tingkat II dan Daerah swanrata Tingkat III.

Menurut pasal 2 dari UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, bahwa wilayah Negara RI terbagi habis dalam daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkat, yaitu Provinsi atau DT.I, Kabupaten atau DT.II dan Kecamatan atau DT.III.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan dari UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah bahwa sebutan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikepalai oleh seorang Walikotamadya. Sedangkan menurut pasal 13 ayat 2 UU No. 5 tahun 1974, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Bandung Periode Tahun 1993 hingga sekarang (Kep.Mendagri No. 28 Th. 1992) adalah sebagai berikut :

a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
b. Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
c. Sekretaris Kotamadya/Daerah.
d. Pembantu Walikotamadya.
e. BP 7.
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
g. Inspektorat Wilayah Kotamadya (Itwilkodya).
h. Asisten Tata Praja.
i. Asisten Administrasi Pembangunan.
j. Asisten Administrasi.
k. Camat.
l. Kamtib.
m. Dinas Otonomi : (Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Tata Kota (DTK), Dinas Pembangunan (DPB), Dinas pertamanan, Dinas Kebakaran,Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Dinas Perumahan (Disperum), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Kesehatan Gizi (DKG), Dinas Kehutanan Pertanian (DKHP), DPTP, Dinas Perusahaan Daerah (Diparda), Dinas Pemakaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pasar).

n. Unit Pelaksana Daerah : (Badan Pengelolaan Drainase dan Limbah Daerah (Bapedalda), Badan Pengawasan Perparkiran (BPP), R.M Babakan Siliwangi).

o. Perusahaan Daerah : (PDAM, PD Kebersihan, PD Bank Pasar).

p. Kantor (Catatan Sipil, Sospol, Bengdes)

q. Bagian.

r. Kecamatan.

s. Kelurahan.

4.1.1.3 Job Description

a. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

b. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang kesehatan.

c. Dinas Tata Kota

Dinas tata kota yang sekarang berganti nama menjadi dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian urusan Pemerintah Daerah, di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

d. Badan Perencanaan Daerah

Badan perencanaan daerah mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya.

e. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

f. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup yang sekarang berubah nama menjadi kantor lingkungan hidup mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

g. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Capil

Dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja, dan ketransmigrasian.

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPPKB)

Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan

mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

i. Dinas Perekonomian dan Koperasi

Dinas koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata.

j. Dinas Penanaman Modal

Dinas penanaman modal yang sekarang berganti nama menjadi kantor penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal.

k. Badan Kesatuan Bangsa

Badan kesatuan bangsa yang sekarang berganti nama menjadi kantor kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

l. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

m. Kecamatan Cimahi Utara

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

n. Kecamatan Cimahi Selatan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

o. Kantor Kepegawaian Daerah

Kantor kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian daerah yang meliputi bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

4.1.1.4 Aktivitas Pemerintah Kota Bandung

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan, yaitu :

- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
- Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang;

- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

b. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana

c. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi, yaitu :

- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
- penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan

- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistik, yaitu :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;

- Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

g. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penanaman modal, yaitu :

- Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
- Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah

Untuk data tahun 2001-2010 yang diteliti diperoleh Pendapatan Asli Daerah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

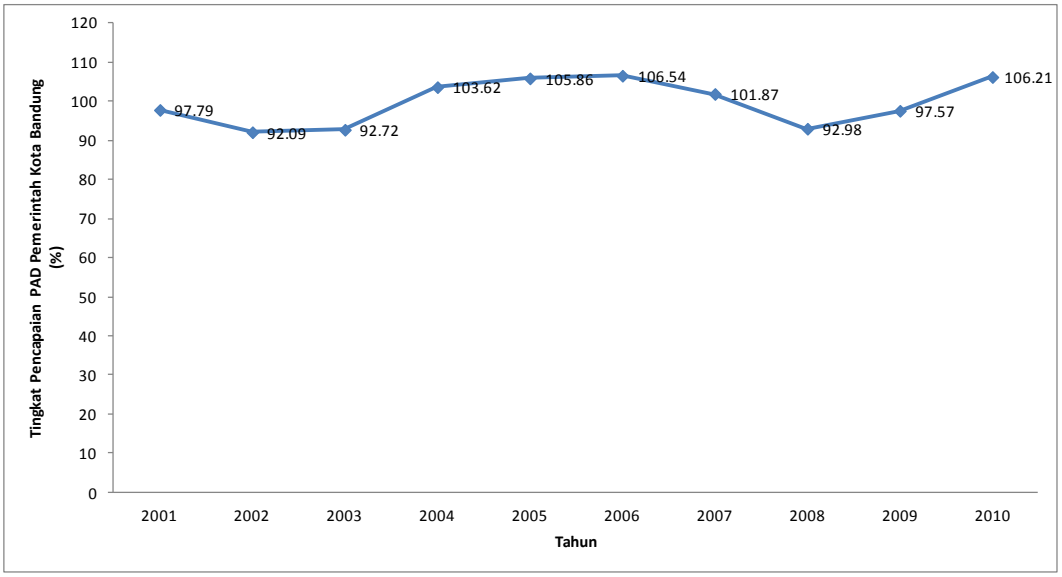
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%
2001	Rp 126,782,348,151.29	Rp 123,984,485,749.23	97.79
2002	Rp 197,699,717,568.00	Rp 182,064,238,544.02	92.09
2003	Rp 229,749,164,455.00	Rp 213,029,461,862.25	92.72
2004	Rp 215,114,010,650.00	Rp 222,909,941,952.75	103.62
2005	Rp 213,100,251,482.00	Rp 225,596,438,613.00	105.86
2006	Rp 238,305,532,000.00	Rp 253,882,919,542.87	106.54
2007	Rp 281,981,582,738.93	Rp 287,249,534,044.93	101.87
2008	Rp 338,376,369,006.00	Rp 314,627,155,412.30	92.98
2009	Rp 369,137,442,213.08	Rp 360,152,627,960.00	97.57
2010	Rp 416,030,066,849.00	Rp 441,863,068,294.00	106.21

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah antara tahun 2001-2010 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2001 hingga tahun 2003 dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target Anggaran Pendapatan Asli Daerah dimana realiasasi kurang dari 100% atau lebih kecil dibandingan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2001 hingga tahun 2003 tidak efektif karena realisasi karena kurang dari 100%.

Pada tahun 2004 hingga tahun 2007 dapat diketahui ada pencapaian Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi melebihi 100% atau lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota

Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2004 hingga tahun 2007 efektif karena realisasi lebih dari 100%

Pada tahun 2008 hingga tahun 2009 diketahui Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target Anggaran Pendapatan Asli Daerah dimana realiasasi kurang dari 100% atau lebih kecil dibandingan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2008 hingga tahun 2009 tidak efektif karena realisasi kurang dari 100%

Pada tahun 2010 dapat diketahui ada pencapaian Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi melebihi 100% atau lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian pendapatan asli daerah pada tahun 2010 efektif karena realisasi lebih dari 100%

4.2.1.2 Analisis Dana Bagi Hasil

Untuk data tahun 2001-2010 yang diteliti diperoleh Dana Bagi Hasil seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

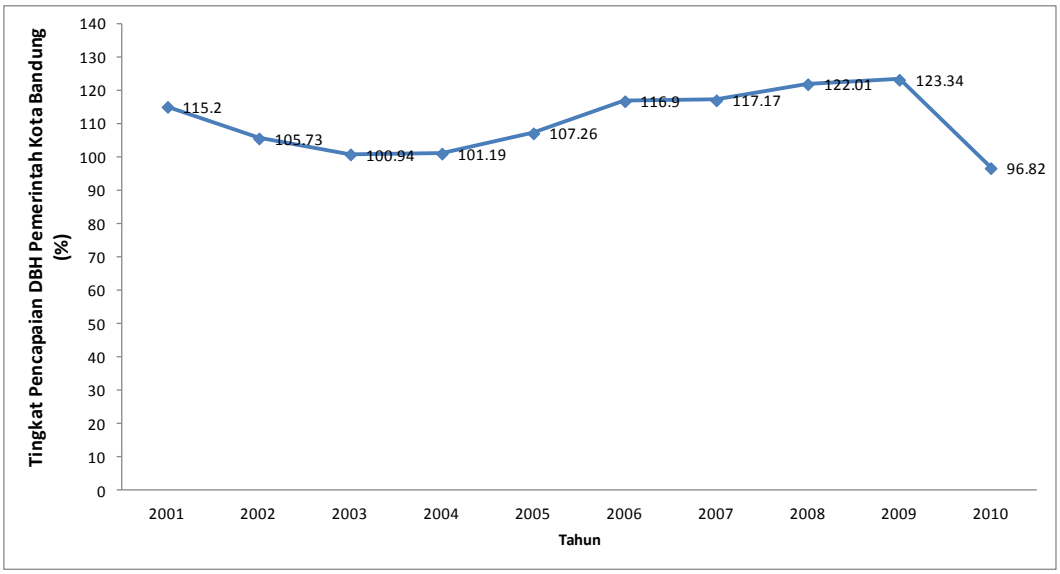
Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Anggaran DBH	Realisasi DBH	%
2001	Rp 113,164,552,000.00	Rp 130,370,009,264.47	115.20
2002	Rp 130,279,209,456.00	Rp 137,744,617,855.00	105.73
2003	Rp 285,709,717,616.96	Rp 288,405,650,700.25	100.94
2004	Rp 434,500,000,000.00	Rp 439,689,469,000.00	101.19
2005	Rp 376,153,202,339.00	Rp 403,478,818,511.00	107.26
2006	Rp 421,433,798,000.00	Rp 492,661,819,397.00	116.90
2007	Rp 218,823,169,675.00	Rp 256,390,017,311.00	117.17
2008	Rp 317,013,175,184.00	Rp 386,775,501,155.00	122.01
2009	Rp 335,664,569,489.00	Rp 414,020,100,100.00	123.34
2010	Rp 511,413,619,031.00	Rp 495,157,460,313.00	96.82

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung

Untuk mengetahui gambaran Dana Bagi Hasil Pemerintah Kota Bandung antara tahun 2001-2010 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.2 Grafik Dana Bagi Hasil

Pada tahun 2001 hingga tahun 2009 dapat diketahui ada pencapaian Dana Bagi Hasil dimana realisasi melebihi 100% atau lebih besar dibandingkan Anggaran Dana Bagi Hasil yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian Dana Bagi Hasil pada tahun 2001 hingga tahun 2009 efektif karena realisasi lebih dari 100%.

Pada tahun 2010 diketahui Dana Bagi Hasil tidak mencapai target Anggaran Dana Bagi Hasil dimana realisasi kurang dari 100% atau lebih kecil dibandingan Anggaran Dana Bagi Hasil yang ditargetkan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian Dana Bagi Hasil pada tahun 2010 tidak efektif karena realisasi kurang dari 100%.

4.2.1.3 Analisis Belanja Daerah

Berikut ini hasil yang diperoleh untuk Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 sampai tahun 2010

Tabel 4.3

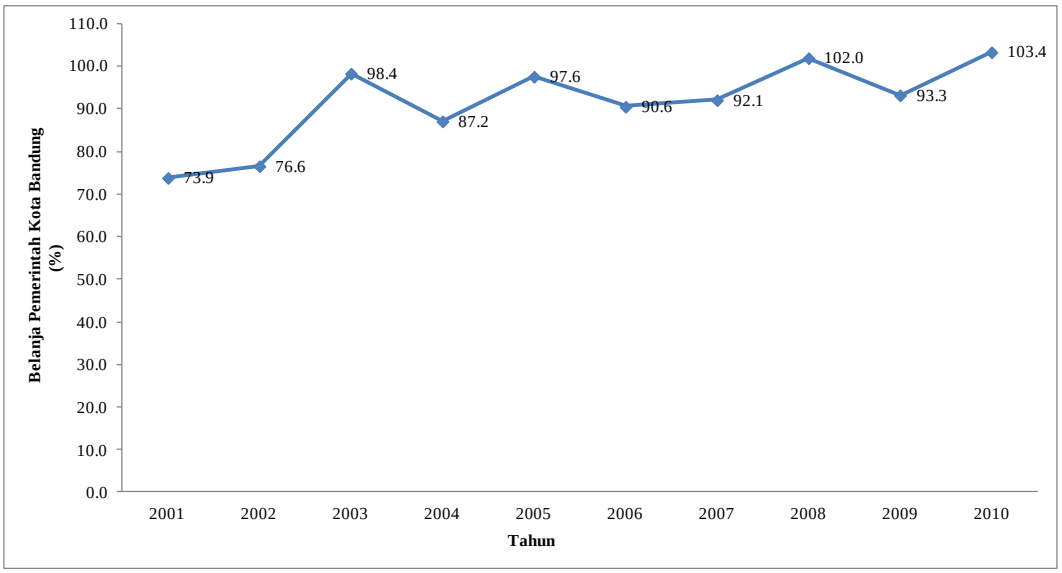
Belanja Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

Tahun	Pendapatan	Belanja	%
2001	Rp 761,202,462,406.54	Rp 562,268,168,632.57	73.9
2002	Rp 843,811,909,467.07	Rp 646,590,348,280.00	76.6
2003	Rp 961,568,767,562.50	Rp 945,824,122,537.58	98.4
2004	Rp 1,118,761,646,228.75	Rp 975,023,708,152.70	87.2
2005	Rp 1,123,097,156,370.00	Rp 1,096,592,281,568.00	97.6
2006	Rp 1,397,711,614,415.87	Rp 1,266,047,202,038.00	90.6
2007	Rp 1,685,638,878,892.93	Rp 1,552,886,614,168.00	92.1
2008	Rp 2,018,841,349,189.30	Rp 2,058,920,582,037.55	102.0
2009	Rp 2,402,466,979,725.00	Rp 2,240,739,995,151.00	93.3
2010	Rp 2,440,160,360,714.00	Rp 2,522,680,816,553.00	103.4

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Untuk mengetahui gambaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung antara tahun 2001-2010 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.3

Grafik Belanja Daerah

Pada tahun 2001 hingga tahun 2007 dan tahun 2009 dapat diketahui Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Masih terdapat kelebihan (surplus) dimana pendapatan lebih besar dibandingan belanja Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Adapun pada tahun 2008 dan 2010 Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit sebesar 2% dan 3.4% dikarenakan pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah tidak efektif karena pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya 92.98% dan pada tahun 2010 Dana Bagi Hasil tidak efektif karena pencapaian realisasi Dana Bagi Hasil hanya 96.82%.

4.2.1 Hasil Analisis Verifikatif

4.2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

1. Analisis Statistik

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah maka dilakukan pengujian statistik baik secara parsial maupun simultan. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, analisis regresi linier berganda, pengujian uji asumsi klasik, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software *SPSS 18 for windows* dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel X_1 dan dana bagi hasil sebagai variabel X_2 dan satu variabel dependen yaitu belanja daerah.

Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Hasil perhitungan koefisien

regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 18 *for windows* berdasarkan data penelitian adalah berikut :

Tabel 4.4

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi X terhadap Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-488220106659.850	181517398348.014		-2.690	.031
	X1 (Pendapatan Asli Daerah)	7.471	.860	1.007	8.687	.000
	X2 (Dana Bagi Hasil).	-.251	.587	-.050	-.427	.682

a. Dependent Variable: Y (Belanja Daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh persamaan regresi taksiran untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut

$\hat{Y}$ = -488220106659.850 + 7,471 X_1 – 0,251 X_2

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta pada persamaan sebesar -488220106659.850 menjelaskan nilai rata-rata Belanja Daerah pada saat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar Rp. -488220106659.850.

2. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (X_1) bertanda positif sebesar 7,471 menunjukkan perubahan Belanja Daerah (Y) jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 1 maka akan terjadi peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp. 7,471.
3. Koefisien regresi untuk Dana Bagi Hasil (X_2) bertanda negatif sebesar – 0,251 menunjukkan perubahan Belanja Daerah (Y) jika Dana Bagi Hasil meningkat sebesar satu satuan. Jadi dapat diketahui jika Dana Bagi Hasil meningkat sebesar satu persen maka akan terjadi penurunan Belanja Daerah sebesar Rp. 0,251 .

1) Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi di analisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regresi tersebut tidak biasa, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi. Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (sepuluh tahun pengamatan).

a) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak

berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan ujisatu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0000061
	Std. Deviation	1.53727068E11
Most Extreme Differences	Absolute	.198
	Positive	.198
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		.627
Asymp. Sig. (2-tailed)		.826

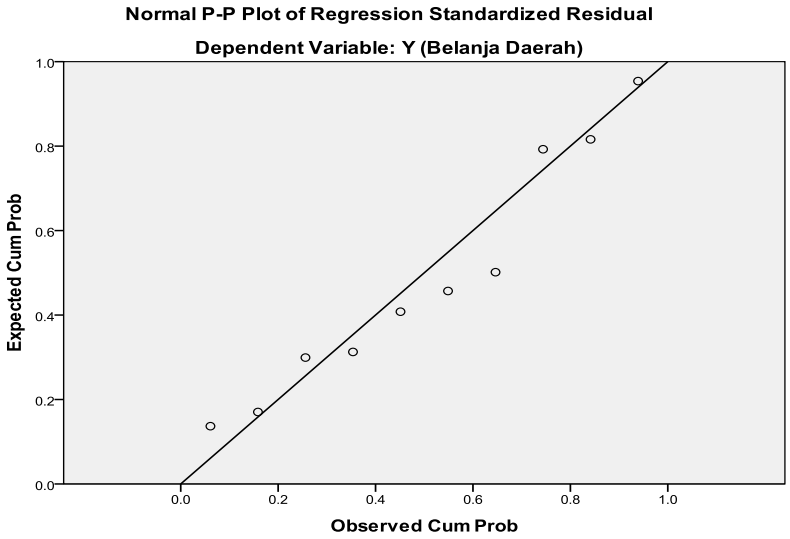
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai D_{hitung} = 0,198 dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,826. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil

perhitungan normalitas menunjukan nilai probabilitas (sig.) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh untuk nilai residual sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05.

Untuk mengetahui normalitas hasil regresi yang diperoleh dapat dilhat dari normal plot. Hasil PP plot untuk uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat data menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual hasi taksiran regresi memenuhi asumsi berdistribusi normal.



Gambar 4.4

Grafik PPPlot dari Hasil Pengujian Normalitas

b) Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai

tolerance > 0,10 dan VIF <10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya, jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.6

Hasil Perhitungan VIF

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1 (Pendapatan Asli Daerah)	.539	1.854
	X2 (Dana Bagi Hasil).	.539	1.854

a. Dependent Variable: Y (Belanja Daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) (X_1) dan dana bagi hasil (DBH) (X_2) > 0,10 dan begitu juga dengan nilai VIFnya <10. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multokolinearitas dalam model regresinya yang diperoleh.

c) Uji Asumsi Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan

mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.8 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien regressi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.7

Hasil Korelasi Rank Spearman untuk Uji Heteroskedastisitas

Correlations[a]

			ABSR
Spearman's rho	X1 (Pendapatan Asli Daerah)	Correlation Coefficient	.079
		Sig. (2-tailed)	.829
	X2 (Dana Bagi Hasil).	Correlation Coefficient	-.200
		Sig. (2-tailed)	.580

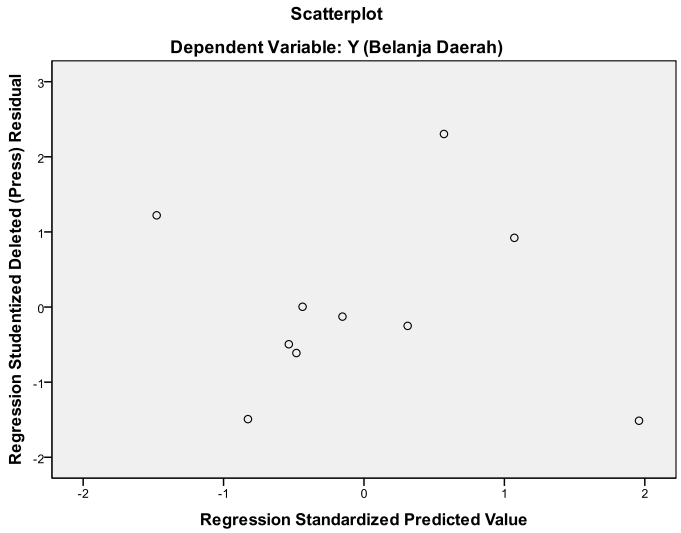
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Listwise N = 10

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukan oleh hasil korelasi variabel X_1 dan X_2 dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk X_1 sebesar 0,829 dan untuk X_2 sebesar 0,580 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan).

Untuk mengetahui hasil Heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat grafik Scetter plot nilai residual. Hasil plot yang diperoleh dari SPSS dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4.5

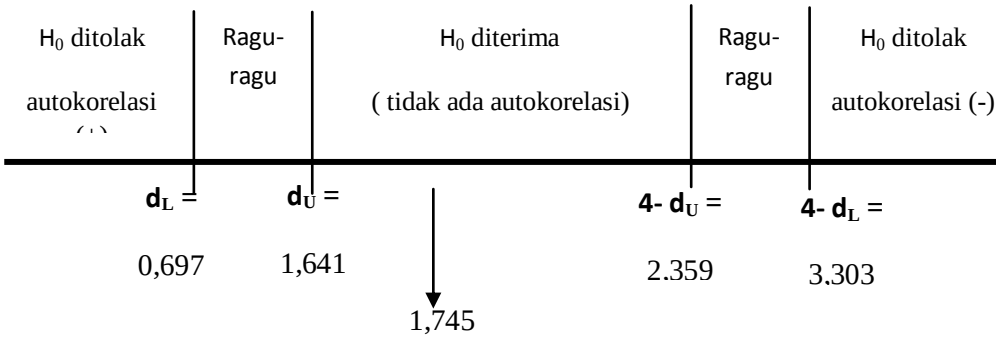
Grafik Scatter Plot dari Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pada grafik scatterplot diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal inimerupakan indikasi bahwa varian residu hasil persamaan regresi yang diperoleh homogen dan dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastistas dalam persamaan regresi yang diperoleh.

d) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pengujian autokorelasi pada model regresi dilihat melalui statistik *Durbin-Watson* (D-W). Hasil perhitungan statistik *Durbin-Watson* (D-W) untuk model regresi Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y) diperoleh sebesar 1,745.

Nilai D-W yang diperoleh dari model dibandingkan terhadap nilaitabel Durbin-Watson. Untuk jumlah observasi 10 dan variabel X dalam model regresi sebanyak 2, diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* (D-W) nilai batas bawah D_L sebesar 0,697 dan nilai batas atas D_U sebesar 1,641. Hasil keputusan uji dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 4.6

Diagram Daerah Pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson

Nilai DW-stat adalah 1,745 berada dalam rentang 4- d_U dan 4-d_L yaitu 1,641< dw = 1,745 < 2,359. Nilai DW berada di daerah tidak ada autokorelasi. Hasil uji menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi yang diperoleh.

b. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja daerah digunakan analisis korelasi pearson (*product*). Korelasi pearson (*product*) digunakan sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu rasio.

Berikutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) dengan belanja daerah. Melalui korelasi parsial akan dicari besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja daerah ketika variabel independen lainnya dianggap konstan. Untuk mengetahui korelasi secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara parsial dengan Belanja Daerah dihitung korelasi parsial.

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada saat Dana Bagi Hasil Konstan

Hasil perhitungan hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada saat Dana Bagi Hasil Konstan dengan *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Korelasi Parsial Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada saat Dana Bagi Hasil Konstan

Correlations

Control Variables			X1 (Pendapatan Asli Daerah)	Y (Belanja Daerah)
X2 (Dana Bagi Hasil).	X1 (Pendapatan Asli Daerah)	Correlation	1.000	.957
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	7
	Y (Belanja Daerah)	Correlation	.957	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	7	0

Nilai korelasi yang diperoleh antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada saat Dana Bagi Hasil konstan sebesar 0,957 masuk dalam kategori sangat kuat. Artinya antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada saat Dana Bagi Hasil konstan terjadi hubungan positif yang sangat kuat, jika Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi akan diikuti dengan Belanja Daerah yang menjadi semakin tinggi.

Besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada saat Dana Bagi Hasil tidak berubah adalah $(0,957)^2 \times 100\% = 91,59\%$.

2. Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada saat Pendapatan Asli Daerah Konstan

Hasil perhitungan hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada saat Pendapatan Asli Daerah Konstan dengan *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Korelasi Parsial Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah

pada saat Pendapatan Asli Daerah konstan

Correlations

Control Variables			X2 (Dana Bagi Hasil).	Y (Belanja Daerah)
X1 (Pendapatan Asli Daerah)	X2 (Dana Bagi Hasil).	Correlation	1.000	-.159
		Significance (2-tailed)	.	.682
		Df	0	7
	Y (Belanja Daerah)	Correlation	-.159	1.000
		Significance (2-tailed)	.682	.
		Df	7	0

Nilai korelasi yang diperoleh antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah pada saat Pendapatan Asli Daerah konstan sebesar -0,159 masuk dalam kategori sangat rendah. Artinya antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah pada saat Pendapatan Asli Daerah konstan terjadi hubungan berbanding terbalik yang tidak kuat, jika Dana Bagi Hasil tinggi tidak diikuti dengan Belanja Daerah yang menjadi tinggi.

Besar pengaruh Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah pada saat Pendapatan Asli Daerah tidak berubah adalah $(-0,159)^2 \times 100\% = 2,5\%$.

c. Analisis Korelasi Ganda

Untuk mengetahui korelasi ganda dan besarnya pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dapat dilihat nilai korelasi dan koefisien determinasi (R^2).

Tabel berikut merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi untuk persamaan regresi yang diperoleh dengan *SPSS 18 for windows* sebagai berikut :

Tabel 4.10

Tabel Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974[a]	.949	.935	1.74310E11	1.745

a. Predictors: (Constant), X2 (Dana Bagi Hasil)., X1 (Pendapatan Asli Daerah)

b. Dependent Variable: Y (Belanja Daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh besarnya korelasi ganda antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah sebesar 0,974. Untuk meberikan interpretasi terhadap nilai korelasi yang diperoleh digunakan kriteria korelasi yang diberikan pada bab 3. Nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,974 masuk dalam kategori sangat kuat.

Artinya antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah terjadi hubungan yang sangat kuat.

Koefisiensi Determinasi (KD) diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = R^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}9743)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}9492 \times 100\%$

$Kd = 94{,}92\%$

Nilai R-*square* (R^2) atau koefisien determinasi berarti 94,92% perubahan Belanja Daerah dipengaruhi (dapat dijelaskan) oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sedangkan 5,08% lainnya dipengaruhi faktor lain yaitu dana alokasi umum dana alokasi khusus dan transfer pemerintah pusat.(Sri Adiningsih 2008:139)

d. Uji Hipotesis

a) Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik Uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan derajat bebas = n–k–1 = 10-2-1 = 7 adalah 2,365.

i. Uji hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

1. Hipotesis Penelitian

   Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

   Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

   Ha : Terdapat pengaruh yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

2. Hipotesis Statistik

   Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (*two tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (H_a) : $\beta \neq 0$.

   Ho : $\beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

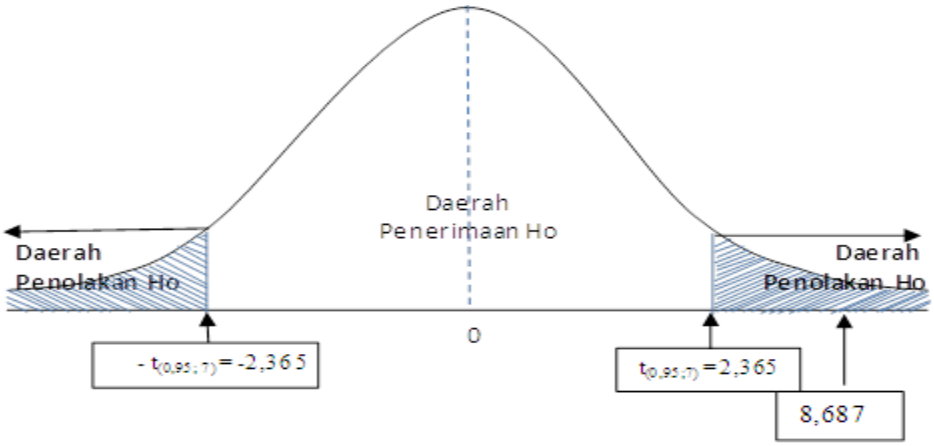
   Ha : $\beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

3. Nilai t_{hitung} dapat dilihat pada tabel 4.5, t = 8,687
4. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Berdasarkan nilai yang diperoleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan asli daerah sebesar 8,687. Karena nilai t_{hitung} (8.687) lebih besar dari t_{tabel} (2,365) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_1 dan menerima Ha_1. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.7

Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_1 terhadap Y

5. Pengambilan keputusan hipotesis

Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah terbukti

melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% (α =0.05), diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa H_0 ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli darah terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara parsial adalah 91,59%, artinya sebesar 91,59% kenaikan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh peningkatan pendapatan asli daerah ketika dana bagi hasil tetap. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan Y. Sri Pudyatmoko bahwa sebagaimana umumnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), uang hasil retribusi masuk ke bagian pendapatan. Pendapatan dari retribusi perizinan ini bersama-sama dengan pendapatan dari sumber lain digunakan untuk menopang kebutuhan belanja daerah.

ii. Uji hipotesis Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah

1. Hipotesis Penelitian

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.

2. Hipotesis Statistik

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (*two tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (H_a) : $\beta \neq 0$.

Ho : $\beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil (DBH)) terhadap Belanja Daerah.

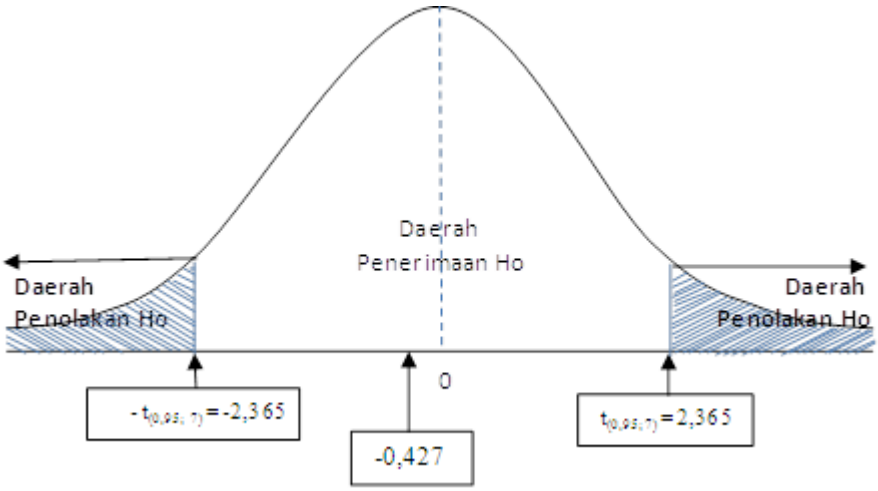
Ha : $\beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.

3. Nilai t dapat dilihat pada tabel 4.5, t=-0,427
4. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Berdasarkan nilai yang diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana bagi hasil -0,427. Karena nilai t_{hitung} (-0,427) lebih kecil dari t_{tabel} (2,365) Keputusan uji adalah H_0 diterima. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_0 sebagai berikut:



Gambar 4.8
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial X_2 terhadap Y

5. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar -0,427 berada pada daerah penerimaan Ho, yang berarti bahwa dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

Besarnya pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah secara parsial adalah 2,5%, artinya sebesar 2,5% kenaikan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh peningkatan dana bagi hasil ketika pendapatan asli daerah tetap. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alfan H. Harahap yang berjudul Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara, hasil penelitian ini

adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

b) Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung 2001-2010 sebagai berikut:

a. Hipotesis Statistik

Ho : $\beta_{12} = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.

Ha : $\beta_{12} \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.

b. Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Simultan

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9223372036854776.000	2	9223372036854776.000	65.440	.000[a]
	Residual	9223372036854776.000	7	9223372036854776.000		
	Total	9223372036854776.000	9			

a. Predictors: (Constant), X2 (Dana Bagi Hasil)., X1 (Pendapatan Asli Daerah)

b. Dependent Variable: Y (Belanja Daerah)

Sumber : Lampiran Output SPSS

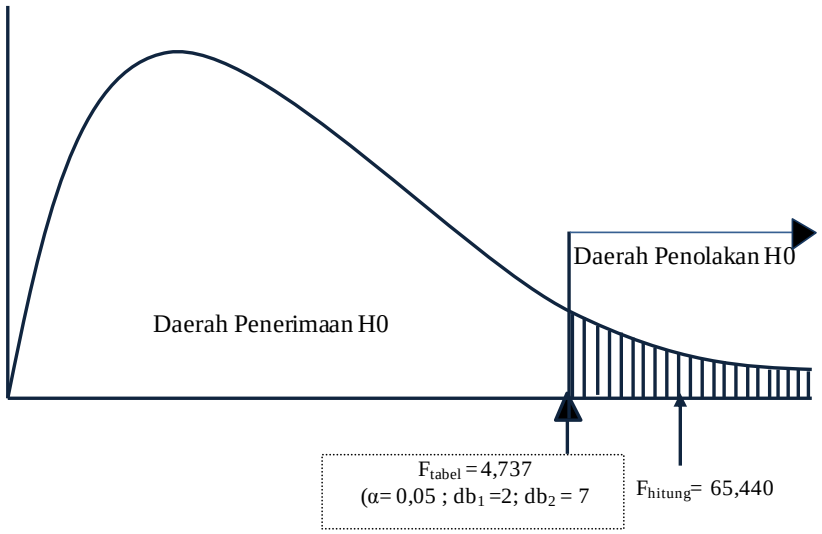
c. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

   Nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel berdasarkan tingkat signifikansi (α) =5% dan derajat kebebasan pembilang= k dan derajat kebebasan penyebut = n-k-1. Kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

   - H_0 = F hitung > F tabel maka H_0 ditolak
   - Ha = F hitung < F tabel maka H_a ditolak

   Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 65,440 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas (2;7)

diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,737. Karena F_{hitung} (65,440) lebih besar dari F_{tabel} (4,737) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) Ho ditolak sehingga Ha diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung periode 2001-2010.



Gambar 4.9

Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho Pada Pengujian Simultan

d. Pengambilan keputusan hipotesis

Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji-F dengan tingkat kekeliruan 5% (α =0.05), diperoleh hasil bahwa H_0 ditolak. Dengan

kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama terhadap belanja daerah. Besarnya pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah adalah sebesar 94,92%. Artinya 94,92% perubahan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya sebesar 5,08% dipengaruhi faktor lain, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan transfer pemerintah provinsi.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah data realisasi dana bagi hasil yang tiap tahunnya tidak selalu naik yaitu pada tahun 2005 dan 2007 sedangkan belanja daerah setiap tahun selalu naik yaitu pada periode 2001 sampai 2010, sehingga hasil penelitian menunjukan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah.